

## BAB V

### KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul *DINAMIKA POLRI: Latar Belakang dan Proses Pemisahan dari Struktur ABRI Tahun 1999*. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh penulis di dalam bab sebelumnya. Terdapat empat hal yang penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, yaitu:

*Pertama*, integrasi POLRI - ABRI pada tahun 1961-1967 berada di bawah Presiden. Namun setelah terjadinya G 30 S, kedudukan POLRI berubah menjadi berada langsung di bawah Panglima TNI bersama Angkatan Perang lainnya seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan ABRI agar tidak terjadi disintegrasi ABRI. POLRI menjadi angkatan keempat dalam struktur ABRI. Masuknya POLRI ke dalam jajaran ABRI tidak hanya berdampak terhadap perubahan kedudukan tetapi perubahan pada peran, sistem anggaran, sistem pendidikan dan sebagainya. Doktrin perang yang diberikan kepada POLRI membuat anggota POLRI lebih bersifat militeristik sehingga tidak jarang ketika di lapangan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan.

Peran POLRI di bawah ABRI membuat kinerja POLRI menjadi tidak profesional dan lemah. Hal ini disebabkan karena beban kerja POLRI yang ganda. Disamping sebagai alat negara yang bertugas menjaga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, POLRI juga harus menjalankan fungsinya sebagai Angkatan Perang yakni menjaga kedaulatan negara. Dalam menjalankan tugasnya ini, POLRI harus tunduk kepada perintah atasan (TNI), lemahnya kekuatan POLRI dalam ABRI yang selalu diatur dan diawasi oleh ABRI sebagai institusi induknya, sehingga tidak sedikit berbagai kasus keamanan yang berhubungan dengan persoalan sosial - politik yang seharusnya menjadi tugas kepolisian, pada akhirnya diselesaikan oleh TNI.

Disamping itu, sistem anggaran POLRI sulit untuk dideteksi karena dimasukkan kedalam anggaran ABRI, ketidakjelasan dan ketidakmerataan dalam pembagian anggaran ini terkadang anggaran POLRI sering dikalahkan oleh ABRI yang berdampak terhadap operasional POLRI mengalami keterbelakangan. Keadaan seperti ini membuat institusi POLRI mengalami ketrbelakangan, yang pada akhirnya menjadi faktor untuk diadakannya reformasi POLRI.

*Kedua*, proses reformasi POLRI tidak terlepas dari adanya peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Soeharto dari kursi Presiden. Tuntutan dari reformasi pada tahun 1998 adalah salah satunya yaitu penghapusan dwifungsi ABRI yang menjadi ciri khas dari

**Galun Eka Gemini 2012**

**Dinamika POLRI...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kekuatan politik Orde Baru. Kondisi politik tersebut memberikan jalan terhadap institusi POLRI untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi POLRI terjadi setelah pergantian kepemimpinan nasional dari Soeharto kepada B.J. Habibie. Presiden Habibie memberi sinyal kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk meninjau kembali kedudukan POLRI di dalam ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 berdasarkan Inpres No 2 Tahun 1999 terjadi pemisahan struktur POLRI dari ABRI dan merubah kembali istilah ABRI menjadi TNI. Sejak itu pula terjadi perubahan kedudukan POLRI dari ABRI. Perubahan ini semakin diperkuat dengan TAP MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang pemisahan POLRI dari ABRI dan Peran POLRI/ABRI.

*Ketiga*, upaya POLRI dalam menjawab tuntutan masyarakat di era reformasi adalah melalui upaya-upaya perubahan aspek struktural, instrumental, dan kultural. Aspek struktural mencakup perubahan kelembagaan dalam ketatanegaraan serta perubahan organisasi, susunan dan kedudukan POLRI. Dari segi kelembagaan, POLRI harus bersifat otonom dan mandiri. POLRI seyogyanya diperlakukan sebagai suatu lembaga khusus negara, yang secara administratif berkedudukan langsung di bawah Presiden, tetapi mandiri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sebagai bentuk realisasi dari reformasi POLRI aspek struktural yaitu telah dimulai dengan keluarnya POLRI dari struktur ABRI,

Aspek instrumental mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek. Dari segi instrumental harus dilakukan penataan kembali, baik secara visi dan misi sampai kepada kemampuan fungsi dan Iptek. Dalam bidang doktrinasi POLRI harus kembali kepada *Tata Tentram Karta Raharja* sebagai modal dasar untuk merubah etika anggota POLRI ketika dilapangan sehingga lebih mengedepankan sikap preventip dalam menjalankan kontrol sosial. Selain itu dalam bidang Iptek dan kemampuan dalam hal ini adalah tingkat pendidikan, pihak instansi POLRI dapat melakukannya dengan cara menata kembali hubungan kerjasama dengan negara-negara maju baik dari teknis maupun operasional.

Aspek kultural sebagai muara dari perubahan aspek struktural dan aspek instrumental, karena semuanya harus terwujud dalam bentuk dan kualitas pelayanan POLRI secara prima kepada masyarakat yang di dalamnya mencangkup pembangunan budaya kepolisian yang mengakui supremasi hukum, demokratis, menjunjung tinggi HAM, serta berwawasan global namun bersendikan lokal.

*Keempat*, reformasi POLRI telah berdampak terhadap kedudukan, peran dan fungsi POLRI. Kedudukan POLRI dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berarti kedudukan POLRI berada di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sejajar dengan Kejaksaan Agung dan merupakan lembaga non Departemen. POLRI dipimpin

oleh seorang Kapolri, dalam menjalankan tugasnya Kapolri dibantu oleh Wakapolri yang berkewenangan menjalankan tugas Kapolri ketika Kapolri sedang berhalangan sesuai dengan Keputusan Presiden No 77 Tahun 2001. Berdasarkan fungsinya yang menyentuh beberapa dimensi lainnya, penempatan POLRI langsung di bawah Presiden merupakan sikap yang di pandang oleh berbagai kalangan adalah sebuah tindakan yang efektif khususnya yang datangnya dari institusi POLRI itu sendiri.

Selain itu, dampak dari reformasi POLRI menyentuh aspek tanda kepangkatan dan sistem anggaran. Tanda kepangkatan yang sebelumnya mengikuti tanda kepangkatan militer (TNI AD) mengalami perubahan tetapi untuk kepangkatan perwira tinggi Bintang Satu dan Bintang Empat hampir sama. Kesamaan itu dapat dilihat seperti Brigadir Jenderal, dan Jenderal. Namun yang membedakannya adalah dalam kesatuan POLRI memakai tanda (Pol) sedangkan dalam militer memakai tanda (TNI). Dalam sistem anggaran, anggaran POLRI menjadi terpisah dengan anggaran TNI (Angkatan Perang). Beranjak dari ini juga yang menjadikan kondisi POLRI baik secara operasional maupun teknis menjadi maju dan mandiri serta terbukanya kembali hubungan kerja sama POLRI dengan kepolisian yang ada di negara-negara lain khususnya negara berkembang seperti Amerika, Inggris, Jerman, Filipina dan sebagainya, yang dulu pernah terjalin.

Disisi lain dampak negatif pisahnya POLRI dari ABRI adalah sering terjadinya bentrokan-bentrokan yang terjadi antara aparat POLRI dengan TNI. Bentrokan-bentrokan tersebut salah satunya diakibatkan karena Posisi POLRI sekarang ini sejajar dengan TNI. Posisi tersebut, membuat POLRI tidak lagi sungkan untuk bertindak terhadap TNI dan terkadang lepas dari kendali sehingga posisi TNI pasca reformasi tidak lagi mempunyai kekuasaan secara lebih untuk mengontrol POLRI.

